



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MATARAM
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAN ROLISKANA
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 112089

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	19.484.250.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.500.000.000		
2. Tanah Seluas 838 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.676.000.000		
3. Tanah Seluas 902 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.255.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 502 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 2.858 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.716.000.000		
6. Tanah Seluas 5.230 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.600.000.000		
7. Tanah Seluas 447 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 894.000.000		
8. Tanah Seluas 447 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 894.000.000		
9. Tanah Seluas 3.537 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 884.250.000		
10. Tanah Seluas 4.260 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.065.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.501.500.000



1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.		
6.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.		
380.000.000		
3. MOBIL, HONDA JAZZ 1.5 RS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.		
280.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.		
835.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	693.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.352.125.524
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	26.030.875.524
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	26.030.875.524

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.